

REGIONAL INFLATION CONTROL TEAM MANAGEMENT (TPID) AS AN EFFORTS TO CONTROL INFLATION IN BLITAR DISTRICT.

Mohammad Taufan Nahdhi

Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

Email: taufannahdhi@gmail.com

Abstract

The low and stable inflation is a recondition to reach a society welfare. In the other hand, the source of inflation in Indonesia not only comes from the government that can be controlled by Bank Indonesia, but also from the demand side. So, the inflation manager needs a cooperation and coordination across instances, that is Bank Indonesia and government. The government and Bank Indonesia transformed an inflation monitor and control team at the central level on 2005, the strengtbening coordination is continued by establishing the regional inflation control team (TPID) on 2008. In order to control and reduce the inflation, it is needed to have a strategic plans through a cooperation of regional institution by establishing the regional inflation control team (TPID) of Blitar District in which it will work to maintain the inflation in Blitar District. So, this research aims to know how is the work management that is implemented by TPID Blitar District on controlling the inflation. According to research hypothesis, how is the work management of TPID Blitar District on controlling the work management in Blitar District?.

This research is filed research which uses a quantitative descriptive approach. The research subjects of this research are the secretary and TPID member of Blitar District. The data from this research is collected by observation, interview, and documentation technique which is validated by using triangulation source, then it is analysed through reduction, display, and conclusions stages.

The research shows that work management of TPID Blitar District on controlling inflation is based on the inflation control guidance which set through governor regulations number 10 year 2015. TPID Blitar District has been implemented management functions indirectly, because the inflation control process that is done by TPID Blitar District has been in line with planning, organising, implementing and controlling function. The management of inflation control which is done by TPID Blitar District has been successfully enough in which the inflation in Blitar District is relatively controlled and stable. Thus, the researcher conclude that the management of inflation control that is done by TPID Blitar District is effective enough with the contribution that they managed to achieve as like as TPID goals.

A. Latar Belakang Teoritis

Menurut analisis ekonomi, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran akan mendorong kenaikan harga barang. Dampak terhadap kenaikan harga adalah tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat inflasi akan menggerogoti pendapatan riil masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ironisnya tingginya inflasi dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. (Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Blitar, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Kabupaten Blitar Buku Panduan, t.dt., h:1.)

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. (Rianto Al Arif, 2010:84). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa Kabupaten Blitar, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap Kabupaten Blitar. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan the Classification of

Individual Consumption according to Purpose (COICOP) atau Klasifikasi Konsumsi Individu menurut Tujuan adalah

Klasifikasi Referensi yang diterbitkan oleh Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membagi tujuan pengeluaran konsumsi perorangan yang dikeluarkan oleh tiga sektor kelembagaan, yaitu rumah tangga, lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, dan pemerintah umum), yaitu: kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan dan olahraga; kelompok transportasi dan komunikasi. (Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Blitar, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Kabupaten Blitar Buku Panduan, h:3)

Pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Melalui kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat di turunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah.

Target atau sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Target Inflasi dan Aktual Inflasi

2013	4.5+1% 8,38
2014	4.5+1% 8,36
2015	4+1% 3,35
2016	4±1% 3,02
2017	4±1% 3,61
2018	3,5±1% 3,04

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan pengamatan pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa inflasi aktual masih meleset dari target inflasi yang ditetapkan. Dari tujuh pengamatan yaitu dari 2013-2017, hanya terdapat lima pengamatan yang memenuhi target inflasi, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Selebihnya inflasi aktual yang terjadi terdapat beberapa yang melebihi target inflasi maupun lebih rendah dari target inflasi yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2013 dan 2014, inflasi aktual di Indonesia jauh melampaui target yang ditetapkan karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran.

Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan yang bersifat sementara (temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (shocks) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi

baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut. Menyadari pentingnya peran dan koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. (Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Blitar, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Kabupaten Blitar Buku Panduan, h:5-6.)

Inflasi nasional terbentuk dari inflasi daerah, sehingga penelitian tentang inflasi di tingkat daerah sangat diperlukan. Penghitungan inflasi Kabupaten Blitar dilakukan di Kota/kabupaten pemantauan IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota Kediri. Tingkat inflasi Kota Kediri dari tahun 2013-2018 bisa dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 1.2

Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Kabupaten Blitar dan Kota Kediri dan Nasional 2013-2017 Tahun Target Inflasi Kabupaten Blitar Nasional BBM. Meskipun demikian, angka tersebut tetap berada dibawah tingkat inflasi nasional tahun 2014 yaitu sebesar 8,36 persen. Selama tiga tahun terakhir tingkat inflasi Kabupaten Blitar dan Kota Kediri tidak melebihi dari target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, bahkan pada tahun 2017 tingkat inflasi Kabupaten Blitar dan Kota Kediri jauh dibawah dari target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Arikunto, 1990, h: 309.) Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara lugas dan terperinci mengenai “Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar Sebagai Upaya Mengendalikan Inflasi di Kabupaten Blitar”. Sehingga data yang di dapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. (Arikunto, 2005, h:29.) Objek dalam penelitian ini adalah manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar. Sedangkan subjek penelitian adalah benda, hal, orang tempat data untuk variabel penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian adalah sesuai dengan keanggotaan TPID Dalam penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik. (Suprayogo dan Tobrani 2003, h:165.)

2013	4.5+1%	4,63	8,38
2014	4.5+1%	8,05	8,36
2015	4+1%	7,49	3,35
2016	4±1%	1,71	3,02
2017	4±1%	1,30	3,61

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data pada Tabel di atas diketahui bahwa tingkat inflasi Kabupaten Blitar dan Kota Kediri selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah cukup baik. Selama 2013-2017, tingkat inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 8,05 persen untuk inflasi Kabupaten Blitar dan Kota Kediri, dikarenakan naiknya harga. Adapun teknik penentuan subjek yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. (Nasution, 1996, h:98.) Adapun ciri-ciri atau kriteria tersebut adalah:

- a. Ketua TPID Kabupaten Blitar;

- b. Wakil ketua TPID Kabupaten Blitar;
 - c. Sekretaris TPID Kabupaten Blitar;
 - d. Anggota TPID Kabupaten Blitar.
- Menurut ciri-ciri atau kriteria yang telah ditentukan oleh penulis diatas, maka didapatkan subjek penelitian 5 (lima) orang.

Pada saat pengumpulan data, peneliti juga menggunakan alat dalam proses pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan telaah dokumen adalah seperti kamera, alat tulis, alat rekam suara, dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. Peneliti mengambil data dengan mencatat, merekam suara percakapan yang dilakukan antara peneliti dan partisipan, memfoto kegiatan yang dilakukan oleh partisipan tanpa mengganggu kegiatan yang dilakukan oleh partisipan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. (Mardalis, 2004, h:64.)

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar melalui dialog yang mendalam, terkait dengan manajemen kerja TPID Kabupaten Blitar, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban dari topik penelitian tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar.

2. Observasi

Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. (Arikunto, h:179.) Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang

sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar.

Data yang ingin digali melalui observasi meliputi:

- a. Perencanaan yang dilakukan TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar;
- b. Pengorganisasian TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar;
- c. Pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar;
- d. Pengendalian terhadap TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar.
- e. Permasalahan yang dilakukan TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar;
- f. Kebijakan terhadap TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. (Burhan Bungin, 2007 h:111.) Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2013, h:82.)

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktivitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Blitar.

Adapun hal-hal yang ingin di dokumentasi seperti buku panduan, surat kabar atau berita- berita yang menyangkut tentang TPID, susunan organisasi dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan TPID.

4. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. (Lexy J Moleong, 2007, h:330)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data

dan

- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Penyidik

Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*). Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

5. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya. (Moleong, 2004, h:179.)

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. Data Reduction atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
2. Data Display atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.
3. Data Conclusions atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

(Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1999, h:16-19.).

C. Hasil Dan Pembahasan

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No 60, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar adalah Kantor Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Gambaran Umum Inflasi Kabupaten Blitar

Inflasi yang wajar dan stabil akan menciptakan ekonomi yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga kebutuhan pokok juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

TPID Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya diantaranya penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID secara berkala agar seluruh TPID di Kabupaten Blitar mempunyai komitmen menstabilkan harga. Hal tersebut sesuai dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

PDRB Kabupaten Blitar menyumbang 1,58% PDRB di Jawa Timur atau se per-15 dari PDRB Kota Surabaya (Kontributor terbesar PDRB Jawa Timur). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar juga sedikit lebih cepat dibandingkan

Trenggalek, Tulungagung, dan Kabupaten Kediri.

Ekonomi Kabupaten Blitar bertumpu pada sektor pertanian. Potensi pertanian yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sangat besar. Kabupaten Blitar juga merupakan eksportir hasil pertanian dan peternakan terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Blitar juga

melakukan terobosan untuk menjadikan produk pertanian lebih bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Atau dengan kata lain mengubah wajah Kabupaten Blitar dari Agriculture being Agroindustry. Selain itu, potensi ekonomi juga harus tereksplorasi secara maksimal. Termasuk kawasan wisata juga harus mulai digarap secara baik

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) rata-rata 5 tahun terakhir secara umum pada struktur ekonomi Kabupaten Blitar didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 34,92%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,47 % dan sektor industry pengolahan sebesar 13,01% dan kontribusi pertanian, kehutanan dalam 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 2,73% diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,66 % dan sektor jasa keuangan sebesar 0,02%. Sedangkan untuk potensi Kabupaten Blitar seperti cabai merah mengalami surplus ekitar 16 ribu ton, cabai rawit surplus sekitar 33,5 ribu ton, telur ayam ras 16 juta ekor.

Dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berasal dari Kabupaten Blitar sebagai penghasil telur ayam ras. Populasi ayam ras petelur pada tahun 2018 mencapai 15.365.100 juta ekor, mengalami peningkatan hampir 0,64% dibanding tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi produksi telur pada saat itu. Pada tahun 2018 produksi telur ayam ras pedaging tetap yaitu 1.004.200. Selama periode 2013-2018 produksi telur meningkat, meskipun sempat menurun pada tahun 2014. Hal tersebut disebabkan harga pakan ternak sehingga banyak peternak kecil yang gulung tikar dan alih profesi karena omset tidak bisa menutup kebutuhan operasional saat itu.





Selain itu, berdasarkan dari data Dinas Pertanian Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan I 2018 menginformasikan bahwa Kabupaten Blitar juga merupakan salah satu sentra produksi padi dengan realisasi tanam sebesar 21.784 hektar, realisasi panen sebesar 18.090 hektar dan produksi padi sebesar 92.709 ton.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar untuk tahun 2018 sebesar 5,07% relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,07%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 38,52%. Selanjutnya dikuasai oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan 37,45% yang menunjukkan peningkatan daripada tahun sebelumnya.



Inflasi PDRB Kabupaten Blitar selama periode 2013-2017 masih berkisar antara 4%-5%. Pada tahun 2015 inflasi PDRB sebesar 2,69% cukup menurun dibandingkan dengan inflasi tahun 2014 sebesar 5,66%. Inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi selama periode (2013-2017). Inflasi pada tahun 2017 sebesar 2,69% dipicu oleh kenaikan harga konstruksi yang naik sebesar 6,32%, naiknya harga produksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang naik sebesar 6,09%, serta naiknya harga produksi penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%. Untuk harga produksi penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%. Sedangkan harga produksi administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib naik sebesar 5,07%.

Inflasi PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2017**	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	2,71	3,99
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,71	4,32
C.	Industri Pengolahan	3,30	3,66
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,40	7,21
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,56	4,01
F.	Konstruksi	6,32	5,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	5,99
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,13	4,05
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,32	6,05
J.	Informasi dan Komunikasi	1,43	2,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,46	4,97
L.	Real Estate	2,83	2,73
M.	N. Jasa Perusahaan	3,52	4,39
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,80	5,07
P.	Jasa Pendidikan	2,28	1,73
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,92	2,12
R.	RSTU, Jasa lainnya	1,59	2,22
PDRB Kab. Blitar		2,69	4,25

Sumber : PDRB- BPS Kabupaten Blitar

Peran aktif TPID Kabupaten Blitar secara aktif melakukan berbagai upaya dalam rangka meminimalkan gejolak harga. Langkah penguatan koordinasi telah dilakukan dalam berbagai forum koordinasi antara lain melalui High Level Meeting maupun peningkatan Capacity Building. Selain itu, TPID Kabupaten Blitar juga telah menyepakati beberapa program kerja strategis bersama yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan, pengembangan klaster ketahanan pangan dan pemantauan harga ketersediaan pasokan komoditas serta pemantauan jalur distribusi komoditas juga menjadi program kerja TPID Kabupaten Blitar. Selain hal tersebut, juga dilakukan pemanfaatan kajian dan informasi serta pengendalian ekspektasi masyarakat agar inflasi selalu terjaga.

Prediksi kondisi inflasi kedepan karena faktor pendorong yang antara lain akan meningkatnya permintaan karena kegiatan pilkada dan momen-momen hari raya keagamaan. Selain itu juga karena adanya faktor penghambat yakni kecukupan pasokan dan stok komoditas volatile foods, terutama beras, pengiriman pasokan beras Jawa Timur secara langsung ke luar daerah dari sentra produksi sehingga tidak berdampak positif pada penambahan suplai di dalam Jawa Timur dan juga akan adanya kenaikan tarif angkutan umum sehubungan dengan libur long weekend dan keagamaan. Untuk itu perludilakukan pengecekan berkala terhadap kelancaran pasokan dan ketersediaan stok beras di gudang-gudang, melakukan identifikasi terhadap karakteristik komoditas daerah sekaligus memetakan surplus defisit serta resikonya, meningkatkan sinergi antar OPD dan instansi serta mengalokasi anggaran dalam pengendalian harga juga

tetap mengkomunikasikan hasil pemantauan dan informasi lainnya kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga harus disertai pengendalian inflasi, mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pengendalian inflasi serta agar mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga. Selain itu perludibuat kebijakan dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Terkendalinya inflasi tercermin dari stabilnya harga pada berbagai komoditas. Berdasarkan data SISKAPERPABO sampai dengan akhir Desember 2018 di berbagai komoditas yaitu:

A. Beras

Komoditas beras menunjukkan trend harga yang stabil sejalan dengan konfirmasi Bulog terkait kecukupan stok beras yang tercermin dari kondisi gudang beras saat ini full capacity.

B. Minyak Goreng

Komoditas minyak goreng baik untuk minyak goreng bermerk dan minyak goreng curah menunjukkan trend yang relatif stabil selama Triwulan IV 2018.

C. Daging Sapi Murni

Komoditas daging sapi menunjukkan trend yang relatif stabil, meskipun pada pertengahan bulan Triwulan IV 2018 mengalami penurunan harga dan kembali normal di level harga Rp110.000/kg.

D. Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Komoditas daging ayam ras selama Triwulan IV 2018 menunjukkan trend harga yang meningkat. Penyebab utamanya yaitu akibat gangguan produksi pada awal musim penghujan. Memasuki musim penghujan, tingkat kesehatan ternak cenderung menurun sehingga produktivitas berkurang.

E. Aneka Cabai

Pada Triwulan IV 2018, harga cabai baik cabai merah besar dan cabai rawit mengalami peningkatan harga karena akibat banyaknya panen yang busuk akibat kadar air yang tinggi sehingga terdapat kecukupan stok cabai di pasar.

F. Aneka Bawang

Harga komoditas bawang merah di Triwulan IV 2018 cenderung meningkat.

Kenaikan komoditas tersebut disebabkan oleh kecukupan pasokan karena petani mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk menjemur di musim penghujan.

Memperhatikan pola inflasi pada 2017, perkembangan harga hingga minggu I Januari 2019 dan beberapa indikator makroekonomi terkini, maka beberapa faktor yang mempengaruhi capaian inflasi pada Triwulan I 2019 adalah kenaikan konsumsi d.r. persiapan pelaksanaan Pilkada 2019, penyesuaian tarif sesuai pola awal tahun dan gangguan produksi pangan pada awal musim penghujan. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan dapat tertahan oleh terjaganya ekspektasi masyarakat, tidak adanya kenaikan tarif cukai pada 2019, potensi penyesuaian ke bawah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga dan nilai tukar serta didukung oleh penguatan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

PDRB Kabupaten Blitar menyumbang 1,57% PDRB di Jawa Timur atau se per-15 dari PDRB Kota Surabaya (Kontributor terbesar PDRB Jawa Timur). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar juga sedikit lebih cepat dibandingkan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Ekonomi Kabupaten Blitar bertumpu pada sektor pertanian. Potensi pertanian yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sangat besar. Kabupaten Blitar juga merupakan eksportir hasil pertanian dan peternakan terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Blitar juga melakukan terobosan untuk menjadikan produk pertanian lebih bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Atau dengan kata lain mengubah wajah Kabupaten Blitar dari Agriculture being Agroindustry. Selain itu, potensi ekonomi juga harus tereksplorasi secara maksimal. Termasuk kawasan wisata juga harus mulai digarap secara baik. Inflasi PDRB Kabupaten Blitar selama periode 2013-2017 masih berkisar antara 4%-5%. Pada tahun 2015 inflasi PDRB sebesar 2,69% cukup menurun dibandingkan dengan inflasi tahun 2014 sebesar 5,66%. Inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi selama periode (2013-2017). Inflasi pada tahun 2017 sebesar 2,69% dipicu oleh kenaikan harga konstruksi

yang naik sebesar 6,32%, naiknya harga produksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang naik sebesar 6,09%, serta naiknya harga produksi penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%. Untuk harga produksi penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%. Sedangkan harga produksi administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib naik sebesar 5,07%.

1. Potensi Risiko Inflasi ke Depan

A. Inflasi Inti

Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Dampak fluktuasi nilai rupiah seiring peningkatan Fed Fund Rate yang dapat meningkatkan harga komoditas global di dalam negeri (a.l. Emas), serta harga komoditas berbahan baku impor, seperti pakan ternak ayam ras.
- 2) Perbaikan ekonomi dunia yang mendorong peningkatan harga komoditas global,
- 3) Dampak dari kenaikan harga kelompok administered prices terhadap komponen biaya beberapa komoditas (seperti tarif listrik pada sewa dan kontrak rumah) dan juga adanya kenaikan Pertamina.
- 4) Meningkatnya permintaan masyarakat secara musiman pada saat libur keagamaan atau dalam menyambut Ramadhan dan libur sekolah.
- 5) Konsumsi masyarakat yang masih tinggi pada momentum libur awal tahun.
- 6) Penyesuaian upah pembantu RT menyusul implementasi UMK 2019.
- 7) Kenaikan tarif sewa rumah sesuai pola pada awal tahun.

Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Perkembangan nilai tukar stabil sebagai upaya
- 2) Ekspektasi masyarakat terjaga

B. Volatile Food

Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Kenaikan permintaan karena kegiatan pilkada dan momen- momen hari raya keagamaan.

- 2) Kenaikan harga acuan pembelian beberapa komoditas pangan sesuai Permendag No. 96 Tahun 2018.
- 3) Masih tingginya harga beras premium
- 4) Terjadi peningkatan HET telur ayam ras baik untuk batas bawah maupun batas atas sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No 58 Tahun 2018
- 5) Masih tingginya harga komoditas jagung dan keterbatasan stok yang berdampak pada tingginya harga pakan ternak.
- 6) Potensi gangguan produksi pangan akibat pergantian musim.
- 7) Pengiriman pasokan beras Jawa Timur secara langsung ke luar daerah dari sentra produksi, sehingga tidak berdampak positif pada penambahan suplai di dalam Jawa Timur.

Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Berbagai program yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan (operasi pasar, bantuan ongkos angkut, serta gerai stabilisasi harga)
- 2) Berlangsungnya panen padi pada beberapa sentra produksi a.l. Kab. Ngawi, Kab. Madiun, dan Kab. Kediri.
- 3) Penetapan HET untuk beberapa komoditas pangan strategis (termasuk gula dan beras) oleh Kementerian Perdagangan.
- 4) Potensi berlanjutnya koreksi harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring kembali normalnya populasi ayam pedaging dan ayam petelur di sentra produksi.
- 5) Meningkatnya kerjasama antar daerah yang diinisiasi oleh TPID Blitar dalam rangka menjaga ketersediaan stok jagung sebagai bahan pakan utama ternak.
- 6) Dukungan program Pemerintah dan TPID Kabupaten Blitar melalui operasi pasar

C. Administered Prices

Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Berlanjutnya penyesuaian harga rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai dan PPN rokok
- 2) Potensi kenaikan harga BBM (subsidi dan non subsidi) seiring kenaikan perkembangan harga

minyak dunia yang menunjukkan peningkatan.

- 3) Kenaikan permintaan tiket berbagai angkutan saat libur long weekend dan keagamaan.
 - 4) Kenaikan tarif angkutan antarkota pada momentum liburan awal tahun.
- Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:
- 1) Tambahan subsidi energi pada APBN yang dapat menambah ruang stabilisasi tarif energi.
 - 2) Koreksi harga minyak dunia akibat kenaikan produksi minyak Amerika Serikat dan OPEC di tengah penurunan permintaan.
 - 3) Tidak ada kenaikan tarif cukai pada 2019.

Perencanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Mengendalikan Inflasi di Kabupaten Blitar

Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan pengendalian inflasi Kabupaten Blitar didahului dengan kajian teknokratik, kajian teknokratik adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas pemicu inflasi/deflasi, bobot dan waktu terjadinya inflasi/deflasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana. Pelaksanaan kajian tersebut berdasarkan data historis inflasi/deflasi Kabupaten Blitar dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya dari data tersebut Tim teknis menyusun RKA, RKA atau Rencana Kerja Anggaran.

Pengorganisasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar dalam Mengendalikan Inflasi

Pengorganisasian adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.

Pembentukan susunan keanggotaan TPID serta tugas dan kewajibannya mengacu

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah yang penulis lampirkan pada lampiran 6. Adapun tugas TPID Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah, untuk keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/41/409.06/KPTS/2019. Tugas TPID Kabupaten Blitar terdiri dari:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten.
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
6. Menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Untuk pelaksanaan tugas dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok Kerja Pengendali Inflasi Kabupaten Blitar bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di wilayah kerja masing-masing serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi daerah; menyampaikan laporan ketersediaan barang dan jasa, distribusi dan perkembangan harga di wilayah kerja masing-masing; menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan; melaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Kabupaten Blitar; melaksanakan diseminasi target dan upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat; penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian target inflasi kepada Pemerintah.

- b. Sekretariat Tim Teknis bertugas untuk melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan strategis dengan dinas terkait; menyelenggarakan rapat TPID, baik rapat yang sudah terjadwal maupun insidental; membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah; melakukan kompilasi terhadap laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga; menyusun dan menyiapkan bahan rapat; menyusun risalah rapat; membuat dokumentasi dan surat menyurat TPID; menyiapkan bahan-bahan siaran pers; mengelola web sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS); dan memberikan informasi harga pangan strategis melalui ews.kemendag.go.id, situs resmi dan media massa.

Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar dalam Mengendalikan Inflasi

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar dilaksanakan terhadap tiga hal, yaitu:

a. Sisi produksi;

Pengendalian inflasi pada sisi produksi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Inisiasi dan/atau percontohan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi yang masih belum berkembang budidayanya di Kabupaten Blitar;
2. Pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi pada saat- saat terjadi kekurangan pasokan sebagai penyangga terhadap kekurangan pasokan tersebut.

Pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi yang mengalami

kekurangan pasokan pada saat tertentu sesuai hasil kajian wajib dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tupoksi yang sama melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan. Pada saat- saat tertentu dimana terjadi kekurangan pasokan sesuai hasil kajian, maka TPID Provinsi wajib melaksanakan fasilitasi penyediaan komoditas- komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui Operasi Pasar baik yang tetap maupun yang bergerak. Penyediaan komoditas- komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui Operasi Pasar baik yang tetap maupun yang bergerak dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing menggunakan hasil pengembangan komoditas yang berfungsi sebagai penyangga dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga melalui skema lainnya. Operasi Pasar dibangun secara permanen dan dikelola secara profesional. Pengelolaan Operasi Pasar berada dibawah koordinasi SKPD Provinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan; dan

3. Pemetaan surplus defisit komoditas pokok strategis penyumbang inflasi.

b. Sisi Distribusi

Pengendalian inflasi sisi distribusi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain:

1. Pemantauan stok dan harga komoditas strategis serta analisisnya;
2. Pemberian informasi perkembangan stok dan harga terkini serta analisisnya kepada semua pemangku kepentingan
3. Perbaikan distribusi berupa pemotongan (memperpendek) mata rantai pasokan; dan
4. Kerjasama dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain.

c. Sisi Ekspektasi Masyarakat

Pengelolaan ekspektasimasyarakat dilaksanakan dengan pemberian informasi secara transparan dan mudah. Pemberian informasi berisikan ketersediaan stok dan harga-harga bahan pokok strategis. Pemberian informasi diumumkan melalui berbagai media seperti running text, radio, TV, baleho, spanduk, koran, selebaran, mobil siaran keliling, website, dan media lainnya.

Pengendalian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar dalam Mengendalikan Inflasi

Pengendalian dalam TPID Kabupaten Blitar dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi SKPD/Instansi dalam pengendalian inflasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan segera setelah rilis BPS dilaksanakan. Rapat monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan diikuti oleh semua anggota Tim Teknis guna membahas hasil rilis BPS, informasi komoditas yang mengalami inflasi/deflasi pada bulan sebelumnya, latar belakang terjadinya inflasi/deflasi, serta informasi penting lainnya dalam pengendalian inflasi. Hasil rapat monitoring dan evaluasi digunakan sebagai acuan dalam melakukan review rencana aksi pada bulan berjalan. Rapat monitoring dan evaluasi tersebut biasa disebut rapat persiapan siaran pers dan rapat pelaksanaan siaran pers. Rapat persiapan siaran pers dilaksanakan dalam rangka pendahuluan sebelum rapat siaran pers dilaksanakan, rapat dipimpin oleh Tim Teknis yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hasil rilis BPS. Rapat pelaksanaan siaran pers dilaksanakan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat melalui media-pers tentang ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi, rapat pelaksanaan siaran pers dilaksanakan pada hari kerja yaitu satu hari setelah rilis. TPID Kabupaten Blitar wajib menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau Pokjanas TPI.

Permasalahan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Blitar

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Adanya potensi kenaikan harga emas

perhiasan sejalan dengan perkembangan harga emas murni yang menunjukkan tren peningkatan;

2. Risiko penurunan produksi dan kualitas komoditas hortikultura di tengah cuaca yang masih belum kondusif;
3. Berlanjutnya penyesuaian harga aneka jenis rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai .
4. Potensi kenaikan harga BBM seiring kenaikan harga minyak dunia.
5. Kurangnya koordinasi antar anggota TPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang berkaitan dengan Inflasi Daerah.
6. Data hasil kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang berkaitan dengan Inflasi Daerah tidak dilaporkan kepada Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Blitar secara periodik yang dibebankan kepada Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar selaku Sekretariat TPID Kabupaten Blitar, sehingga Sekretariat TPID Kabupaten Blitar tidak dapat melaporkan hasil kegiatan TPID kepada Kementerian Perekonomian Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan. Meskipun demikian, tekanan harga diperkirakan dapat tertahan oleh beberapa faktor berikut:
 - a. Tidak adanya kenaikan listrik.
 - b. Berlangsungnya panen padi di beberapa sentra produksi antara lain Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan beberapa Kabupaten di Jawa Tengah.
 - c. Terjaganya ekspektasi masyarakat.

Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Blitar

Inflasi yang terkendali dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, serta peningkatan investasi produktif di daerah. Dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Kabupaten Blitar melakukan beberapa program, meliputi:

1. Penguatan kelembagaan TPID;

2. Pengelolaan produksi, distribusi dan konektivitas;
3. Regulasi dan monitoring;
4. Pemanfaatan kajian dan informasi; serta
5. Pengendalian ekspektasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah. Secara tidak langsung TPID Kabupaten Blitar sudah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, karena proses pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kabupaten Blitar sudah sejalan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kabupaten Blitar sudah cukup berhasil membuat angka inflasi di Kabupaten Blitar relatif terkendali dan stabil, itu berarti tujuan dari TPID Kabupaten Blitar dalam mengendalikan inflasi sudah tercapai.

E. Rekomendasi

1. Bagi TPID Kabupaten Blitar agar dapat melakukan pembinaan terhadap TPID Kabupaten/Kota dalam pengendalian inflasi, sehingga pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh TPID Provinsi tetapi juga TPID Kab/Kota agar inflasi Kabupaten Blitar yang stabil dan terkendali dapat terus terwujud.
2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus mensosialisasikan Operasi Pasar, sehingga masyarakat Kabupaten Blitar khususnya Kabupaten Blitar lebih mengetahui dan tertarik berbelanja di Operasi Pasar.
3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dapat dikritisi demi peningkatan ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID.

F. Daftar Pustaka

- Arif, M. Nur Rianto Al, Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Athoillah, Anton, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Kesatu, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya), Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Usman, Asas Manajemen, Cetakan Kesatu, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Firdaus, Rachmat, dan Ariyanti, Maya, Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Karya, Detri dan Syamsuddin, Syamri, Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, S., Metode Research, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedelapan, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suprayogo, Imam, dan Tobrani, Metode Penelitian Sosial – Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Blitar,
Tim Pengendali Inflasi Daerah di
Kabupaten Blitar Buku Panduan,
t.dt.

Zakaria, Junaidin, Pengantar Teori
Ekonomi Makro, Edisi 1, Jakarta:
Gaung Persada, 2013.

Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia,
[http://www.bi.go.id/id/moneter/
kerangka-
kebijakan/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx)
(online 13 Februari 2018).

Penetapan Target Inflasi,
[http://www.bi.go.id/id/moneter/i
nf
lasi/bi-dan-
inflasi/Contents/Penetapan.aspx](http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan.aspx)
(online 13 Februari 2018).